

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Berdasarkan data dari *Centre for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED), setiap tahun bencana alam seperti tanah longsor (gerakan tanah), gempa bumi, banjir hingga tsunami di seluruh dunia telah terjadi lebih dari 400 kali kejadian bencana skala nasional dengan korban jiwa rata-rata 74.000 orang dan berdampak pada 230 juta orang lainnya (Tuladhar *et al.*, 2007). Kondisi ini dapat saja jauh lebih buruk untuk bencana yang berskala lokal di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Sejak tingkat dasar pendidikan formal kita seringkali diberikan pemahaman bahwa Indonesia secara geografis berada pada posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan berada di antara dua samudera. Posisi ini menjadikan Indonesia berada pada titik yang sangat menguntungkan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Meskipun tidak dapat disangkal, posisi ini pula yang menghadirkan banyak tantangan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditilik dari posisi secara geologi, Indonesia juga berada pada kondisi yang luar biasa unik yang tidak dimiliki oleh wilayah negara lain. Indonesia berada pada pertemuan banyak lempeng baik itu lempeng samudera maupun lempeng benua. Pertemuan antar lempeng ini memberikan berbagai dampak baik yang positif maupun negatif. Dampak positif berupa melimpahnya banyak sumber daya geologi, sedangkan yang negatif di lain sisi seperti tingginya potensi bencana. Gempa bumi, tsunami, gunungapi, dan gerakan tanah adalah bencana-bencana geologi yang berpotensi besar terjadi di Indonesia sebagai akibat kondisi geologi yang membentuk kepulauan nusantara.

Posisi Indonesia yang berada pada “sabuk api” bumi (*ring of fire*) menjadikan Indonesia sangat rawan bencana geologi. Indonesia memiliki setidaknya 500 kerucut gunung api, 129 di antaranya merupakan gunung api aktif yang tersebar di jalur gunung api sepanjang 7000 km yang membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Banda hingga Halmahera, dan Sulawesi Utara

(Sutawidjaja dalam Abdurahman dkk., 2013:71). Seperti halnya gunung api, gempa bumi adalah bencana alam yang pasti terjadi. Gempa bumi dapat terjadi dimana dan kapan saja di bumi pertiwi ini, bahkan mungkin diikuti oleh tsunami seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu.

Gerakan tanah mengancam daerah-daerah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan yang terjal. Intensitas dan frekwensinya meningkat ketika curah hujan meninggi terutama di daerah-daerah yang telah berubah tata guna lahannya, dari semula hutan menjadi kebun sayuran. Akhirnya, gerakan tanah yang terjadi dimana-mana seolah-olah menjadi kewajaran karena adanya salah persepsi tentang penyebab bencana ekologis itu (Bachtar dalam Abdurahman dkk., 2013:99). Statistik kematian pun terus meningkat seiring dengan kehancuran ekologis, longsor telah menewaskan banyak orang (Soedradjat dalam Abdurahman dkk., 2013:189)

Jawa Barat termasuk propinsi dengan potensi bencana yang besar dan hampir semua jenis bencana geologi dapat terjadi. Gunungapi Galunggung dan Papandayan pernah menunjukkan kehebatan letusannya dan hingga kini kedua gunungapi tersebut masih berstatus aktif selain gunungapi aktif lainnya. Getaran gempa bumi yang dirasakan warga priangan tak terhitung jumlahnya. Sejarah gempa besar yang pernah terjadi di Jawa Barat dengan kawasan yang menerima kehancuran sangat besar, terjadi di tengah Zona Patahan Palabuhanratu-Padalarang (Bachtar dalam Abdurahman dkk., 2013:107). Tsunami pun pernah menyapu pantai selatan Jawa Barat. Gerakan tanah hampir terjadi di setiap musim penghujan di hampir seluruh kota/kabupaten di wilayah Jawa Barat.

Secara statistik bencana tanah longsor di Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2014 mencapai 2.278 peristiwa. Berdasarkan data BNPB, jumlah kejadian longsor di Indonesia cenderung meningkat, pada tahun 2005 tercatat ada 50 kejadian tanah longsor, 2006 ada 73 kejadian, 2007 sekitar 104 kejadian, dan 2008 ada 112 kejadian. Frekuensi bencana tanah longsor meningkat lagi di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009 ada 238 kejadian, 2010 ada 400 kejadian, 2011 terjadi 329 kejadian, 2012 ada 291 kejadian, 2013 ada 296 kejadian, dan 2014 naik menjadi 385 kejadian. Jawa barat sendiri menjadi provinsi paling sering

terjadi tanah longsor dengan 132 kejadian, disusul Provinsi Jawa Tengah dengan 102 kejadian, dan Jawa Timur dengan 47 kejadian.

Kabupaten Bandung pernah menduduki peringkat empat daerah paling berpotensi bencana di Indonesia pada tahun 2013. Banjir rasanya tak pernah berhenti terjadi setiap musim penghujan di daerah Bandung Selatan, bahkan April 2016 lalu banjir bandang terjadi di aliran Sungai Cilaki, hingga menghanyutkan beberapa rumah di Desa Dampit, Cicalengka. Di saat bersamaan, longsor pun terjadi di dua belas titik di daerah yang masih termasuk daerah pedesaan tersebut.

Masyarakat pedesaan dimungkinkan mengalami kerentanan terhadap bencana akibat rendahnya praktik-praktik mitigasi. Hal ini menurut Caruson & MacManus dalam Kapucu *et al.* (2013) disebabkan oleh rendahnya kapasitas dari pemerintah daerah dan sumber-sumber keuangan dari sebuah basis ekonomi yang solid. Lebih jauh, alokasi anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat yang disusun berdasarkan pada ukuran populasi menjadi sangat bias ketika diterapkan pada masyarakat pedesaan, sehingga berpengaruh pada upaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik mitigasi.

Mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan di negeri yang sarat potensi bencana ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Prediksi atau peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi resiko bencana. Namun, karakteristik setiap bencana geologi berbeda-beda, tidak semua bencana dapat diprediksi keterjadiannya. Gempa bumi terjadi tanpa diawali oleh penanda yang dapat dideteksi oleh manusia meski dengan teknologi terkini. Gunung api, tsunami, dan gerakan tanah dapat diprediksi tanda-tandanya sebelum terjadi. Pemerintah telah membangun pos-pos pengamatan gunungapi dan sistem peringatan dini tsunami. Pemantauan gerakan tanah pun telah dilakukan di daerah-daerah yang memiliki sejarah dan masih berpotensi terjadi bencana gerakan tanah dalam skala yang besar. Namun itu semua tidak cukup, peran masyarakat sangatlah dibutuhkan.

Indonesia yang rawan bencana ini menuntut program mitigasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Pemerintah memang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk dari ancaman potensi bencana. Namun, mengingat berbagai keterbatasan termasuk luasnya wilayah yang berpotensi bencana, maka peran masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi sangat penting.

Provinsi Jawa Barat, sebagai daerah dengan rawan bencana tertinggi di Indonesia, perlu melibatkan semua pihak termasuk komunitas dan masyarakat sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan bencana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sebuah bencana tidak menimbulkan korban dan materi yang begitu besar. Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar pernah mengatakan, bahwa sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan bencana, perlu melibatkan berbagai komunitas dan peran serta masyarakat di sekitar daerah rawan bencana. Selain itu, kesadaran masyarakat pun perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang bencana yang bisa terjadi. Upaya mitigasi atau pencegahannya harus lebih dulu dilakukan melalui sistem peringatan dini (*early warning system*), termasuk kerjasama dengan berbagai komunitas yang ada dan kompeten. Edukasi mengenai bencana pun perlu untuk dilakukan, sekolah-sekolah perlu memberikan pendidikan atau pengetahuan tentang kebencanaan kepada anak didiknya, sehingga tercipta generasi sadar bencana ke depannya. (Sumber:<http://jabarprov.go.id/index.php/news/16183/2016/02/24/Wagub-Libatkan-Masyarakat-Dalam-Mitigasi-Bencana>)

Merujuk pada tahapan mitigasi, peran serta masyarakat dapat dilakukan pada saat sebelum bencana, saat bencana terjadi, dan pada saat setelah bencana. Peran serta terpenting pada saat pra bencana adalah dengan membantu pemerintah melakukan prediksi, meski dengan keterbatasannya. Penduduk Simulue dapat dijadikan contoh nyata dalam hal keberhasilan masyarakat menghadapi bencana. Ketelitian seorang warga yang pernah mengalami tsunami tahun 1907 sehingga dapat mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya tsunami, dan menurunkannya kepada keluarga dan masyarakat dari generasi ke generasi, mampu

menyelamatkan mereka dari tsunami besar tahun 2004 (Bachtiar dalam Abdurahman dkk., 2013:112)

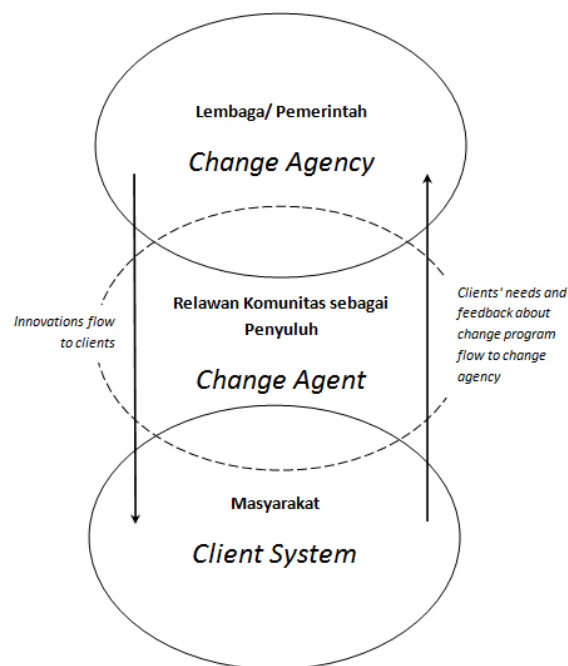
Peran serta masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam mengurangi dampak bencana yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keuntungan terbesar pelibatan masyarakat dalam mitigasi bencana adalah pembangunan kepercayaan diri dan peningkatan kemampuan dalam persiapan menghadapi bencana. Lebih jauh, pelibatan masyarakat juga akan menghasilkan solusi-solusi praktis dalam mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Apalagi bila terjalin hubungan yang kuat di antara anggota masyarakat, maka kemampuan menghadapi bencana pun akan lebih baik seperti yang dikemukakan oleh Kapucu dan Van Wart dalam Kapucu et al. (2013) " ... *strong social relations amongst community members influence the timing of evacuation behavior.* "

Kapasitas masyarakat terdiri dari empat faktor kunci. Salah satunya adalah modal sosial yang menggambarkan hubungan dan jaringan yang kuat dalam masyarakat. Kompetensi masyarakat diukur melalui strategi pemecahan masalah, keterampilan, dan fleksibilitas. Bagian penting lain dari kapasitas masyarakat adalah bagaimana informasi mengalir di dalam masyarakat dan bagaimana infrastruktur komunikasi dirancang dan diwakili oleh sumber informasi terpercaya. Sejauh mana sumber daya ekonomi dan risiko terbagi secara adil di masyarakat adalah faktor lain yang menentukan pembangunan kapasitas masyarakat. Kondisi terbaik dari keempat faktor tersebut akan membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam ketahanan terhadap bencana, terutama yang tinggal di pedesaan. (Aldrich; NRC; Norris *et al.*; dan Waugh dalam Kapucu *et al.*, 2013)

Pentingnya peran masyarakat dalam mitigasi bencana pada tahap pra bencana disadari oleh pemerintah dan ditunjukkan dengan berbagai upaya mitigasi pra bencana yang melibatkan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan atau bentuk mitigasi struktural. Pusdiklat Geologi (sekarang Pusat Pengembangan SDM Geologi dan Minerba), setiap tahun menyelenggarakan berbagai diklat bidang mitigasi bencana geologi yang diikuti aparatur pemerintah daerah. Namun sekembalinya ke daerah, alumni diklat belum dapat menjadi seperti yang

diharapkan dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat luas.

Alumni diklat seharusnya dapat menjadi agen perubahan (*change agents*) yang akan menyediakan jalur komunikasi antara sistem sumberdaya (misal lembaga) dan masyarakat sebagai sistem pengguna (Roger, 1983:312). Peran utama agen perubahan ini adalah memfasilitasi aliran inovasi (ide, praktik, atau objek yang dianggap baru) dari sebuah lembaga kepada audiensi pengguna. Agar efektif, inovasi haruslah dipilih berdasarkan kebutuhan dan permasalahan pengguna. Timbal balik dari pengguna pun harus mengalir melalui agen perubahan kepada lembaga agar dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kesuksesan atau kegagalan sebelumnya (Roger, 1983:313).



Gambar 1.1 Agen perubahan menyediakan hubungan antara *Change Agency* dan *Client System*. (Dimodifikasi dari Roger, 1983:314)

Di lingkungan masyarakat Indonesia, terutama di daerah berpotensi bencana, kita dapat menemui komunitas-komunitas beranggotakan relawan masyarakat yang peduli dan memiliki perhatian lebih dalam membantu pemerintah melakukan mitigasi bencana yang terjadi di lingkungannya. Komunitas-komunitas ini dapat

menjadi garda paling depan dalam mitigasi bencana. Posisinya yang berada di tengah masyarakat dan dekat dengan sumber bencana menjadikan komunitas dapat berperan aktif dalam proses mitigasi, tidak saja pada tahap pasca bencana namun lebih penting dalam upaya pencegahan bencana. Peran para relawan pada tahap pra bencana bisa berbentuk apa saja, mulai dari peringatan dini bencana hingga penyebarluasan informasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat di lokasi yang berpotensi terjadinya bencana.

Sayangnya, kemampuan para relawan yang tergabung dalam komunitas lebih kepada kemampuan penyelamatan korban bencana pada saat dan pasca bencana. Mereka tidak memiliki kemampuan memadai dalam mitigasi pra bencana. Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum penelitian ini terhadap para relawan komunitas di daerah Bandung Selatan, diidentifikasi lemahnya kompetensi para relawan di bidang mitigasi bencana pada tahap pra bencana. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya proses mitigasi yang komprehensif, dari hulu ke hilir, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marlan, S.IP, Asda Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Pemkab. Bandung, memperkuat hasil observasi. Beliau menyatakan bahwa para relawan saat ini masih sangat fokus pada penanganan korban bencana, belum pada prediksi bencana terutama bencana gerakan tanah.

1.2 Rumusan Masalah

Relawan yang cakap, efektif dan efisien sangat ditentukan oleh informasi, pengalaman dan pelatihan yang diterimanya sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar yang cukup sebelum terjun ke daerah bencana. Sebagai tenaga bantuan bencana, sekadar menjadi relawan saja tidaklah cukup saat ini, perlu kiranya meningkatkan kompetensi relawan bencana bahkan lebih jauh mungkin diperlukan sertifikasi profesi. Hal ini untuk memperbaiki kerja tenaga relawan baik dalam kompetensi maupun koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Kompetensi, kontrol kualitas, dan peningkatan pengetahuan bagi relawan menjadi penting agar seseorang tidak sekedar menjadi relawan. Ke depan, adanya sertifikasi ini, relawan dapat mengetahui akan

kompetensi sesungguhnya yang dimiliki ketika merespons bencana. (Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/06/ohqr5u368-muhammadiyah-tekanakan-perlunya-relawan-bencana-tersertifikasi/>)

Jumlah relawan bencana di Jateng yang telah mengantongi sertifikat kompetensi penanganan bencana masih minim.. Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, saat ini terdapat sekitar 6.000 sukarelawan bencana yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, yang lolos sertifikasi belum ada 10 persennya. (Sumber: <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sukarelawan-bersertifikat-masih-minim/>). Kurangnya pemahaman tentang kebencanaan menjadi salah satu penyebab utamanya. Lemahnya kompetensi para relawan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, latar belakang pendidikan formal yang hanya sebatas pendidikan menengah menjadikan masyarakat tidak memiliki pengetahuan memadai dalam kegiatan mitigasi pada tahap pra bencana khususnya. Pendidikan formal memang belum memasukkan kompetensi mitigasi bencana secara memadai dalam kurikulumnya baik pada tingkat menengah maupun pada pendidikan tinggi sekalipun. Pendidikan kebencanaan hingga saat ini masih disampaikan dalam pendidikan-pendidikan non formal.

Kedua, beberapa diklat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Geologi atau yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memang fokus pada peningkatan kompetensi teknis kebencanaan namun masih sulit diakses oleh anggota komunitas masyarakat. Lembaga-lembaga diklat pemerintah masih berfokus pada aparaturnya pemerintah sebagai sasaran peserta diklat. Padahal harus disadari bahwa diklat menjadi sarana penting peningkatan kompetensi anggota komunitas dibanding pendidikan formal. Kurikulum diklat mitigasi bencana yang dikembangkan di institusi pemerintah termasuk di Pusdiklat Geologi belum menjadikan masyarakat sebagai sasaran pesertanya. Beberapa diklat kebencanaan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau BNPB/BPBD lebih kepada kemampuan mitigasi pada saat dan setelah bencana terjadi.

Sebagai contoh, Diklat Relawan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo memiliki susunan materi sebagai berikut:

Asep Rohman, 2017

PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKLAT DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH BAGI KOMUNITAS MASYARAKAT DI DAERAH BANDUNG SELATAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
2. Karakteristik Bencana di Indonesia
3. Perencanaan Penanggulangan Bencana
4. Manajemen Pertolongan Korban
5. Standar Minimal Pertolongan dan Evakuasi Korban
6. Sistem Standar Manajemen Keadaan Darurat
7. Wawasan Kebangsaan
8. Peningkatan Kapasitas Relawan
9. Membangun Karakter Kemanusiaan (*Humanitarian Character Building*)
10. Persepektif dan Implementasi Relawan di Indonesia
11. Peran Relawan Saat Tangap Darurat
12. Peran Relawan Saat Pemulihan
13. Peran Relawan dalam Aspek Logistik dalam Penanggulangan Bencana
14. Standar Operasional Pertolongan Pertama Korban Bencana
15. Mekanisme Komunikasi dan Informasi
16. Pengenalan Dapur Umum dan Tempat Tinggal Sementara (*Shelter*)

Melalui diklat ini diharapkan peserta memiliki pengetahuan dan informasi dasar relawan sehingga pada saat terjadi bencana dapat berfungsi dengan maksimal, efektif dan efisien serta mengetahui tugas dan fungsinya sebagai relawan. (Sumber: <http://bpbk.kulonprogo.go.id/article-32-pendidikan-dan-pelatihan-relawan-penanggulangan-bencana-kabupaten-kulon-progo.html>).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat juga pernah menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Relawan PB di Kawasan Situ Cileunca Pangalengan Kabupaten Bandung, acara ini diselenggarakan selama 4 hari dari tanggal 28-31 Oktober 2016. Peserta Pelatihan terdiri oleh relawan penanggulangan bencana dari seluruh elemen di Jawa Barat. Dalam pelatihan ini para relawan mendapatkan ilmu dan kemampuan mulai dari nilai-nilai kebangsaan, dinamika kelompok, sistem dan manajemen kedaruratan PB, SOP kesiapsiagaan dan kedaruratan, pedoman & kecakapan relawan penanggulangan bencana, pemahaman tugas sektor kesehatan, sektor logistik, sektor evakuasi,

evakuasi medan air dan evakuasi medan terjal, tugas TRC Penanggulangan Bencana dan Posko dalam Penanggulangan Bencana, tugas sektor sosial dan pengungsi, simulasi pendampingan psikososial, dan simulasi penanggulangan bencana. (Sumber:

<http://www.bpbd.jabarprov.go.id/index.php/component/k2/item/67-pelatihan-peningkatan-kapasitas-relawan-pb-provinsi-jawa-barat-2016>)

Ketepatan sasaran dan dampak dari pelatihan ini belum optimal berkontribusi dalam proses mitigasi khususnya pada tahap pra bencana. Muncul tantangan bagi para pengembang kurikulum dan pelaksana diklat untuk mengembangkan diklat bidang mitigasi bencana geologi ini. Pelatihan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan saat ini dan kemungkinan pergeseran kebutuhan di masa yang akan datang. Sasaran peserta pun perlu ditinjau ulang dengan tetap mempertahankan aparatur sebagai sasaran atau beralih pada masyarakat sebagai sasaran. Tentu dengan alasan efektifitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, harus pula ditentukan kelompok masyarakat yang akan disasar. Isi materi diklat pun harus dimutakhirkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pun metode yang akan digunakan harus dipilih secara seksama agar tepat dengan sasaran peserta diklat.

Menjadikan masyarakat sebagai sasaran peserta diklat ke depan dinilai penting. Akses lebih luas bagi masyarakat daerah terdampak bencana untuk mendapatkan bantuan program diklat kebencanaan menjadi hal yang perlu ditumbuhkembangkan. Tentu program diklat yang ditujukan bagi masyarakat ini tidak serta merta dapat menggunakan program diklat reguler yang ada yang digunakan untuk aparatur sebagai sasaran pesertanya. Perubahan sasaran peserta menuntut adanya perubahan desain program diklat. Koordinasi dengan pemangku kepentingan diperlukan dalam memetakan kompetensi terkait sebagai panduan dalam melakukan analisis kebutuhan. Saat implementasi, dibutuhkan konsistensi dan tanggung jawab para penyelenggara dan manajemen untuk menjalankan rencana. Evaluasi juga harus dianggap sebagai komponen yang sama pentingnya dengan perencanaan dan implementasi. Evaluasi harus dapat memberikan gambaran sejauh mana efektifitas kurikulum dalam meningkatkan kompetensi

peserta diklat dan kualitas program. Satu hal yang pasti, harus terdapat benang merah sebagai sebuah siklus yang jelas mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Atas dasar itu, muncul rumusan masalah utama yang perlu dilakukan penelitian yaitu **bagaimana kurikulum diklat dikembangkan secara tepat untuk meningkatkan kompetensi anggota komunitas dalam mitigasi bencana geologi khususnya bencana gerakan tanah**. Rumusan masalah utama tersebut akan dapat dijawab melalui penelitian terhadap sub rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan analisis kebutuhan pada anggota komunitas masyarakat sebagai sasaran peserta sebagai tahap awal pengembangan kurikulum diklat?
2. Bagaimana penyusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum diklat untuk meningkatkan kompetensi anggota komunitas masyarakat dalam bidang mitigasi bencana gerakan tanah?
3. Bagaimana implementasi kurikulum diklat untuk meningkatkan kompetensi anggota komunitas masyarakat dalam bidang mitigasi bencana gerakan tanah?
4. Bagaimana efektifitas kurikulum diklat dalam meningkatkan kompetensi anggota komunitas masyarakat dalam bidang mitigasi bencana gerakan tanah?

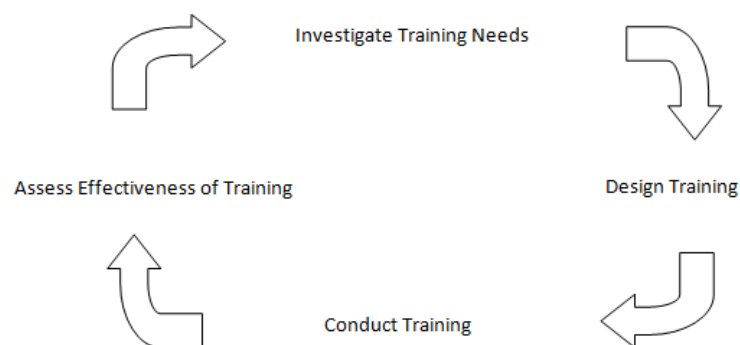
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai:

1. Seluruh komponen yang dibutuhkan dalam menyusun program diklat yang didapatkan melalui proses analisis kebutuhan. Komponen-komponen tersebut antara lain kesenjangan kompetensi bidang mitigasi bencana geologi khususnya bencana gerakan tanah pada tingkat nasional/ sektor, profil daerah bencana, dan profil komunitas masyarakat.
2. Kerangka dasar dan struktur kurikulum dari model kurikulum yang disusun sebagai tindak lanjut dari hasil analisis kebutuhan pada anggota komunitas masyarakat. Model kurikulum dimaksud dapat berupa hasil modifikasi dari program diklat yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan memastikan ketepatan konten kurikulum sesuai dengan karakteristik komunitas masyarakat sebagai sasaran peserta.
3. Implementasi model kurikulum diklat. Program diklat sebagai bentuk implementasi kurikulum harus dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen kurikulum.
4. Efektifitas model kurikulum dalam meningkatkan kompetensi peserta diklat. Peningkatan kompetensi peserta diklat diketahui melalui proses evaluasi yang dalam penelitian ini terbatas pada hasil *pre-post test* dan penilaian praktik penyuluh saja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini adalah tergambarnya sebuah proses pengembangan kurikulum pendidikan non formal dalam bentuk diklat sebagai sebuah siklus dari pendekatan sistematis diklat. Model dasar yang dikembangkan Buckley dan Caple (2009:25) menunjukkan empat komponen dalam pengembangan diklat. Empat komponen tersebut adalah analisis kebutuhan, desain diklat, penyelenggaraan diklat, dan penilaian efektifitas diklat. Model ini dapat dirujuk sebagai siklus ideal jika kita berada dalam proses pengembangan sebuah diklat.



Gambar 1.2 Model dasar dari pendekatan sistematik diklat
(Buckley dan Caple, 2009)

Model dasar di atas, dilakukan secara utuh dalam penelitian ini dengan harapan bahwa model kurikulum yang dikembangkan dapat dijadikan acuan dalam pengorganisasian tujuan, isi, dan pengalaman belajar yang akan diikuti oleh para peserta diklat. Evaluasi yang terbatas pada *pre-post test* dan penilaian praktik menyuluh dapat dilakukan untuk menilai efektifitas model kurikulum dalam meningkatkan kompetensi sesuai tuntutan kesenjangan yang ditemukan dalam proses analisis kebutuhan.

Manfaat penelitian secara praktis akan dirasakan lembaga diklat seperti Pusdiklat Geologi dengan tergambarinya sebuah siklus ideal dari pengembangan diklat khususnya diklat yang ditujukan bagi masyarakat. Seluruh komponen dari siklus ditunjukkan dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif dan memiliki benang merah yang jelas. Kurikulum diklat yang tersusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan akan diimplementasikan dalam program diklat yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Kurikulum diklat bidang mitigasi bencana geologi yang disusun berdasarkan prinsip dan landasan pengembangan kurikulum akan menjadi contoh untuk pengembangan kurikulum bidang lainnya.

Bagi masyarakat khususnya bagi komunitas, penelitian ini akan memberikan manfaat peningkatan kompetensi para relawan yang berada pada komunitas masyarakat peduli bencana. Analisis kebutuhan, desain kurikulum, implementasi dalam program diklat hingga evaluasi diharapkan benar-benar berujung pada peningkatan kompetensi para relawan yang menjadi peserta diklat. Peningkatan

kompetensi tersebut akan dapat bermanfaat bagi penguatan komunitas, lebih jauh akan mengurangi risiko bencana melalui mitigasi bencana lebih dini. Peran masyarakat dalam mitigasi pun akan semakin besar.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menjadi salah satu acuan dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan non formal dalam bentuk diklat. Pengembangan kurikulum diklat harus mulai dipandang sejajar dengan kurikulum pendidikan formal dan harus melalui proses yang dilakukan berdasarkan prinsip dan landasan pengembangan kurikulum. Para pengembang kurikulum memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan studi lebih lanjut tentang kurikulum pendidikan non formal di Indonesia.

Terakhir, manfaat dari penelitian ini tentunya dirasakan langsung oleh Peneliti sebagai pengembang kurikulum di lingkungan Kementerian ESDM. Peneliti dapat memberikan kontribusi positif terhadap budaya organisasi lembaga diklat terutama dalam pengembangan kurikulum diklat yang hingga saat ini dirasakan masih jauh dari ideal. Peneliti juga dapat mendorong tumbuh kembangnya penelitian dalam pengembangan kurikulum kediklatan untuk mencapai tujuan lembaga meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia sektor ESDM.